

Tidak ada prediksi yang benar-benar akurat. Begitulah kira-kira yang harus kita pahami terkait prediksi Francis Fukuyama yang begitu yakin Kapitalisme dan Demokrasi versi Barat akan memainkan peran yang dominan dalam aras global pasca runtuhnya Komunisme. Menanti sekiranya Perang Dingin telah merubah peta politik dunia, Namun ternyata itu hanya sementara. Barat yang telah fokus pada Komunisme lupa bahwa ada ideologi-ideologi lain seperti Ideologi Islam (Islamisme) dalam beragam bentuknya yang ternyata mempunyai kekuatan penyeimbang. Islamisme dengan segala kekuatannya terus merasuk ke negara-negara Demokrasi yang masih rentan seperti di Indonesia. Islamisme telah berhadapan dengan Pancasila dan terus berebut pengaruh dengan Kapitalisme dan Demokrasi di Nusantara.

Jika selama Perang Dingin Indonesia hanya menjadi figuran, kini harus berbalik untuk bertahan dari desakan Islamisme dan Kapitalisme. Negara kini bersusah payah untuk merevitalisasi kembali nilai-nilai Pancasila yang sudah hampir dilupakan ditengah pertarungan ideologi-ideologi besar di Indonesia. Segera elemen bangsa Indonesia tidak pernah menyadari bahwa Pancasila pasti akan masuk dalam pasaran ideologi dunia. Namun sayangnya infrastruktur negara tidak cukup kokoh dalam menegakkan Pancasila untuk menjadi ideologi yang tangguh melainkan kian hancur Pancasila seakan kehilangan kekuatannya dan menjadi rapuh. Padahal Pancasila harus terus menghadapi desakan Islamisme melalui jalur politik dan kekerasan dan pada saat yang sama juga berusaha keluar dari pengaruh Kapitalisme.

Buku ini dihadirkan sebagai upaya oleh Universitas Jember, CHRM dan para penulis untuk terus memfiksasikan nilai-nilai Pancasila. Semoga penerbitan buku ini dapat melengkapi referensi para pembaca tentang Pancasila dan dapat memberikan sumbangsih untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

#### EDITOR :

- Al Khamd, S.H., (Universitas Jember), M.A., (Universitas Gadjah Mada), LL.M., (Universitas Lanusete), Ph.D (SOAS Universitas London) adalah Direktur dan Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember.
- Marneggol Kusuma Wardaya, S.H., (Universitas Jenderal Soedirman), LL.M. (Universitas Monash), kandidat Doktor (Universitas Radboud) adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Mirza Satira Bruma, S.H., (Universitas Lambang Mangkurat), M.H., (Universitas Islam Indonesial), Dr. (I.C. Beumer School of Law Universitas Queensland) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambang Mangkurat.

#### KONTRIBUTOR :

- Abdulkar Djy Hara, Al Khamd, Baiq Wardham, Faris Novi Anggoro, Laksana Hakim, Luthfi Witagdyo Ekhyono, Mahabir Muhammad Iqbal, Mirza Satira Bruma, Moh. Imanaga Jusufi, Nuruddin Al Akbar, Pudin Eko Kiriyaning, Rio Septian Noor, Soefin Bago Santoso, Vincenzo Daino.

PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA

## PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA



The Centre for Human Rights  
Multiculturalism and Migration  
University of Jember, Indonesia

#### EDITOR :

Al Khamd, S.H., LL.M., Ph.D  
Marneggol K. Wardaya S.H., LL.M  
Mirza Satira Bruma S.H., M.H., Ph.D

The logo of Universitas Jember is a yellow shield-shaped emblem with a grey border. Inside the shield, the word "UNIVERSITAS" is written in a grey arc at the top, and "JEMBER" is written in a grey arc at the bottom. In the center of the shield is a stylized green and red emblem resembling a bird or a flame.

**PANCASILA,  
TRANSNACIONALISME  
DAN  
KEDAULATAN NEGARA**



**PANCASILA,  
TRANSNACIONALISME  
DAN  
KEDAULATAN NEGARA**

**Editor:**

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D

Manunggal K. Wardaya S.H., LL.M

Mirza Satria Buana S.H., M.H, Ph.D

# Digital Repository Universitas Jember



**The Centre for Human Rights  
Multiculturalism and Migration**

*University of Jember, Indonesia*





## Pengantar Editor

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya program penerbitan buku Pancasila yang secara berkala diterbitkan oleh Universitas Jember dan the Centre for Human Rights, Multiculturalism (CHRM2) dengan tema “PANCASILA, TRANSNASIONALISME DAN KEDAULATAN NEGARA” berhasil diterbitkan. Hampir selama setahun terakhir tim editor bekerja keras untuk ‘mendamaikan’ dinamika ideologis baik dalam proses telaah substantif naskah dan finalisasi naskah sebelum dikirim ke penerbit. Semua tulisan-tulisan yang masuk ke redaksi telah melalui proses penelaahan dan seleksi dengan metode *blind review*, tanpa prasangka dan/atau bias *a priori*. Sejumlah naskah yang masuk dan kami pandang berbobot dan segar berhasil kami pilih. Dengan sendirinya pula, terdapat beberapa naskah yang terpaksa harus ditinggalkan karena dirasa masih jauh dengan tema besar buku ini.

Tiga kata kunci yang menjadi pokok bahasan buku ini sejatinya berkelindan kuat, dan amat relevan dengan dinamika politik dan kemasyarakatan di Indonesia saat ini. Transnasionalisme yang dianggap sebagai anak kandung globalisasi kerap dianggap sebagai ‘pisau bermata dua’ dimana di satu sisi membawa keuntungan kepada negara-negara, sedangkan disisi lain membawa potensi hegemoni ideologis laten dan dominasi jejaring aktor ekonomi yang berbahaya dan predatorik. Dalam konteks ekonomi internasional, transnasionalisme adalah suatu keniscayaan sejarah (*historical necessity*) dikarenakan semakin mengerutnya hubungan-hubungan antar negara sehingga menciptakan *global village* yang mempengaruhi kebijakan politik, hukum dan ekonomi negara-negara di dunia.<sup>1</sup> Mobilitas barang (komoditas), orang, pemikiran (ideologi) dalam lintas kawasan adalah suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan, dimana sekat-sekat antar negara dan regional semakin memudar. Dibukanya kebijakan pasar bebas (*free trade policy*) oleh beberapa negara-negara adidaya (*super power states*) juga mempercepat terjadinya fenomena ini.

---

<sup>1</sup> Ribut Lupiyanto, ‘HTI, Ideologi Transnasional, Dan Geopolitik Global’ *detiknews* (Mei 2017) <<https://news.detik.com/read/2017/05/24/114816/3510176/103/ht-ideologi-transnasional-dan-geopolitik-global>> accessed 30 May 2018.

Sejatinya, transnasionalisme lahir dari ‘rahim’ pemikiran ekonomi yang berlandaskan kapitalistik-liberal. Dalam relasi ekonomi transnasionalisme, hubungan antar negara tidak melulu dijalankan oleh pemerintah, walaupun secara formal-prosedural, setiap kerjasama antar negara-negara selalu diinisiasi lewat jejaring birokrasi antar negara-negara, namun dalam prakteknya pengaruh korporasi juga berperan besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan strategis suatu negara. Dalam praktik bernegara dan berbangsa, korporasi bahkan cenderung mendominasi ruang-ruang publik dan politik yang sejatinya merupakan domain kebijakan negara. Di Indonesia, kuatnya pengaruh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut terhadap hajat hidup orang banyak terlihat begitu telanjang.

Teori ekonomi liberal *trickle-down effect* merupakan salah satu kajian teoritik yang gencar didengungkan oleh kalangan pro-transnasionalisme perdagangan, bahwa pada akhirnya pembangunan-pembangunan yang distimulus oleh raksasa-raksasa ekonomi dunia akan ‘merembes’ ke masyarakat sekitar. Namun dalam praktiknya, ‘rembesan’ tersebut tidak lah pernah terjadi, dikarenakan kuatnya dominasi perusahaan terhadap supremasi ekonomi suatu negara. Pada akhirnya yang terjadi adalah aliansi *simbiosis mutualisme* antara perangkat pemerintah dengan perusahaan-perusahaan predatorik yang secara ekspansif memberangus hak-hak fundamental warga negaranya. Dalam *setting* kedaulatan negara yang cacat struktural tersebut, *state-corporatism* (aliansi korporasi-negara) sangatlah mudah ditemukan. Fenomena ini tentu nya diametral bagi eksistensi negara Pancasila yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan keadilan sosial, sebagaimana telah diderivasi dalam Konstitusi Ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (Amandemen) 1945.

Namun begitu, transnasionalisme tidak semata berdimensi dan berefek ekonomi. Arus mobilitas pemikiran dari luar (Timur Tengah) juga membawa ideologi-ideologi sempalan yang cenderung kontra terhadap eksistensi dan kedaulatan hukum nasional. Aliran-aliran keagamaan (terutama Islam) yang berlandaskan konservatif kerap muncul dan eksis dalam ruang-ruang publik di masyarakat. Persoalan munculnya agama-agama dalam konteks pertarungan ideologi antar negara ini mulai muncul di sekitar Tahun 1980an dimana Jose Casanova memahaminya



sebagai agama publik.<sup>2</sup> Di beberapa dekade setelahnya, agama (terutama Islam), seakan berusaha mematahkan proposisi Francis Fukuyama yang dengan yakinnya mengatakan berakhirnya perang dingin secara otomatis menysakan kapitalisme dan demokrasi versi Barat sebagai penguasa tunggal di dunia.<sup>3</sup> Faktanya, ekspansi agama (Islam) sebagai ideologi baru dalam tatanan kenegaraan modern membaaur dan bersaing ketat dengan ideologi-ideologi transnasionalisme di banyak negara. Salah satu contohnya adalah Indonesia dimana agama telah masuk terlalu dalam di ruang-ruang publik, memanfaatkan krisis politik pasca otoritarian di tahun 1998, dan membaaur dengan elemen-elemen demokrasi di masa transisi demokrasi yang rentan sampai saat ini.

Ideologi Islam transnasional tersebut mengacau pada pergerakan ideologi global yang dianggap mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dialami oleh Indonesia pada saat ini. Islam tentu disepakati oleh para penganutnya sebagai agama yang baik. Namun ketika Islam dipolitisir oleh sekelompok orang untuk kepentingan tertentu, Islam sebagai agama akan bermetamorfosis menjadi Islamisme yang ditegakkan hanya untuk menjaga kepentingan pengusungnya.<sup>4</sup> Islamisme yang oleh pengusungnya diyakini sebagai 'tersempurna' ini melewati batas-batas negara dan bangsa, dan merupakan ideologi tandingan dari konsep negara-bangsa (*nation-state*), khususnya Kapitalisme dan Demokrasi versi Barat dan kedaulatan negara.<sup>5</sup> Ideologi Islam transnasional tersebut tidak hanya bermain pada ranah peribadatan dan dakwah semata, namun juga merambat pada ranah 'Islam politik' yang berorientasi mengganti dasar hukum negara Pancasila dengan tafsir kebenaran mereka sendiri. Berbagai kelompok pengusungnya dengan lantang menyuarakan formalisasi hukum Islam dalam hampir semua aspek kehidupan bernegara dan mendorong terbentuknya Khilafah Islamiyah, cita-cita yang sedari awal dituju oleh organisasi Islam fundamentalis semisal Hizbut Tahrir Indonesia. Kelompok Islam transnasionalis ini berevolusi dalam wujud terekstrim

---

<sup>2</sup> Lihat selengkapnya di José Casanova, *Public Religions in the Modern World* (University of Chicago Press 2011).

<sup>3</sup> Lihat selengkapnya di Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (Free Press ; Maxwell Macmillan Canada ; Maxwell Macmillan International 1992).

<sup>4</sup> Lupiyanto (n 1).

<sup>5</sup> Lihat misalnya Al Khanif, *Pancasila dalam pusaran globalisasi* (Penerbit & distribusi, LKiS 2017) 115-119.

menjadi kelompok-kelompok radikal dan bahkan ekstrim yang berwujud pada praktik-praktik terorisme.

Cabaran terhadap ideologi negara sebagaimana dibincang diatas tentu perlu ditanggapi melalui arena diskusi yang obyektif dan terbuka. Ideologi Pancasila yang inklusif perlu diperkuat dengan memberi pemahaman dasar akan nilai-nilai transendental-demokratis dalam Pancasila itu sendiri. Islam merupakan salah satu nilai-nilai yang memperkaya Pancasila dan bukannya kontradiktif sebagaimana dicoba kesankan. Alih-alih saling mengalahkan, keduanya dapat membangun relasi yang saling menguatkan, mengokohkan. Islam *Ahlussunah Wal Jamaah* yang menganut konsep *wasathoniyyah* (berdiri ditengah) semestinya mampu menjembatani friksi-friksi antara agama (Islam) dan negara. Sementara itu, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa menjadi menemukan relevansinya untuk membendung paham-paham transnasionalisme ekonomi dan politik diatas. Pancasila ibarat menjadi penengah dalam kuasa tarik menarik antara transnasionalisme dengan globalisasi dengan sentiment-sentimen ideologis yang sedang menguat saat ini. Dalam hal ini perlu eksistensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang mampu mediasi dan memiliki daya lenting guna menjawab tantangan-tantangan zaman menjadi penting untuk direvitalisasi.

Buku ini diharapkan mampu memberi pencerahan akan tantangan-tantangan transnasionalisme sekaligus memberikan tawaran ide-ide inklusif-demokratis yang dijiwai oleh semangat Pancasila. Buku ini pula diharapkan akan memperluas cakrawala pandang bagaimana implementasi Pancasila menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tak gagap mengalami tantangan zaman, terutama sekali fenomena global yang kini melanda. Persoalan kekinian terkait radikalisme agama, intoleransi, dan bahkan terorisme yang menjadi persoalan riil dari sekian banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia diharapkan dapat menemukan tawaran solusi dan strategi yang cerdas dan bernas melalui aneka pemikiran dan gagasan yang tertuang dalam buku ini.

Jember, 30 Mei 2018

# Digital Repository Universitas Jember

Pancasila, Transnasionalisme Dan Kedaulatan Negara

**Tim editor**

Al Khanif  
Manunggal K. Wardaya  
Mirza Satria Buana



## DAFTAR ISI

Pengantar Editor → v

Daftar Isi → ix

### **BAB I PANCASILA, KOSMOPOLITANISME DAN TRANSNASIONALISME →**

Sila Persatuan Indonesia dalam Miskonsepsi Identitas Geo-kultural: Perspektif Hubungan Antarnegara → 1  
Baiq Wardhani & Vinsensio Dugis

Nasionalisme Indonesia dalam Era Globalisasi: Sebuah Refleksi Historis → 17  
Abubakar Eby Hara

Pancasila sebagai Instrumen Penekan Transnasionalisme Ekonomi dan Hukum Internasional → 45  
Mirza Satria Buana

### **BAB II PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME DALAM ARUS IDEOLOGI TRANSNASIONAL →**

Revitalisasi Pancasila Di tengah Arus Globalisasi → 65  
Mahathir Muhammad Iqbal

Antara Transnasionalisme Wahhabi, Pancasila dan Kedaulatan Negara → 79  
Nurrudin Al Akbar

Problematika Multikultural Dan Konstruksi Pancasila → 127  
Moh. Irmawan Jauhari

Tafsir Pancasila dan Masa Depan Agama-Agama di Indonesia →  
150  
Al Khanif

### **BAB III PANCASILA DAN KONSEP KEDAULATAN NEGARA →**

Mahkamah Konstitusi Dan Eksistensi Sistem Ekonomi Pancasila  
Dalam Pusaran Liberalisasi Ekonomi → 167  
Sadhu Bagas Suratno

Pancasila dan *Original Intent* Norma Konstitusi yang Tidak Dapat  
Diubah (*Unamendable Articles*) dalam Perubahan UUD 1945 →  
185  
Luthfi Widagdo Eddyono

Parameter Bernegara Bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila →  
205  
Lukman Hakim

### **BAB IV MERAJUT KEINDONESIAAN DALAM KONSEP PANCASILA →**

Membumikan Pancasila Sebagai Ideologi Pembangunan  
Indonesia → 222  
Firma Novi Anggoro

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Falsafah Huma Betang  
di Kalimantan Tengah Dalam Rangka Menangkal Dampak Negatif  
Transnasionalisme → 241

# Digital Repository Universitas Jember

Pengantar Editor

Rico Septian Noor





# Digital Repository Universitas Jember

## Daftar Isi

Keadilan Sosial bagi Perempuan Pengidap HIV/AIDS di  
Indonesia → 254

Paulus Eko Kristianto

Daftar Kontributor → 269









## Daftar Kontributor

**Abubakar Eby Hara, S.H.** (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM), M.A. (International Relations RSPAS Australian National University Canberra), Ph.D. (International Relations RSPAS Australian National University Canberra), Peneliti di Center for Research in Social Sciences and Humanities C-RiSSH Universitas Jember.

**Al Khanif, S.H.** (Universitas Jember), M.A. (Universitas Gadjah Mada), LL.M. (Universitas Lancaster), Ph.D. (School of Oriental and African Studies/SOAS Universitas London) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, direktur the Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember dan Ketua Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia periode 2017-2019.

**Baiq Wardhani, Dra.** (Universitas Airlangga), MA (Monash University, Australia), Ph.D. (Monash University, Australia). Staf pengajar pada Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

**Firna Novi Anggoro, S.H.** (Universitas Lampung), M.H. (Universitas Lampung) adalah PNS di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

**Luthfi Widagdo Eddyono, S.H.** (Universitas Gadjah Mada), M.H. (Universitas Indonesia). Peneliti Mahkamah Konstitusi. Aktif pada Center for Democratization Studies, Insight Indonesia, dan Indonesia-Turkey Research Community.

**Mahathir Muhammad Iqbal S.IP.** (Universitas Muhammadiyah Malang), M. AP. (Universitas Brawijaya Malang). Kini bekerja sebagai staf pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

**Mirza Satria Buana, S.H.,** (Universitas Lambung Mangkurat), M.H., (Universitas Islam Indonesia), Dr. (T.C. Beirne School of Law

Universitas Queensland) adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

**Paulus Eko Kristianto**, S.Si. Teol (Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta), M.Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta). Kini, mahasiswa program doktor ilmu filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta dengan area konsentrasi Filsafat Kebudayaan

**Vinsensio Dugis**, Drs. (Universitas Airlangga), MA (University of Adelaide, Australia), Ph.D. (Flinders University, Australia). Staf Pengajar pada Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga.

**Nuruddin Al Akbar**, S.I.P (Universitas Gadjah Mada), M.A (Universitas Gadjah Mada). Peneliti muda di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Aktif pada Pusat Kajian Profetik Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada

**Moh. Irmawan Jauhari**, S. Th. I (STAIN Kediri), M. Pd. I (IAIN Tulungagung), mahasiswa doktoral PAI Multikultural (UNISMA Malang), adalah pengajar di STAI-Ma'arif Kendal Ngawi

**Sadhu Bagas Suratno**, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Jember), M.H. (Fakultas Hukum Universitas Jember) adalah Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi, Jawa Timur

**Rico Septian Noor**, S.H (fakultas hukum Universitas Palangka Raya) M.H (Fakultas hukum Universitas Brawijaya) adalah dosen tetap pada fakultas hukum Universitas Palangka Raya (UPR) provinsi Kalimantan Tengah

**Lukman Hakim**, SH (Universitas Brawijaya Malang), MH (Universitas Padjadjaran Bandung), Dr (Universitas Brawijaya Malang). Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang